

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. *Signaling Theory*

Signaling theory atau teori sinyal dikembangkan oleh Ross, (1977) menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor agar harga saham dalam perusahaannya meningkat. Hal positif dalam *signaling theory* dimana perusahaan yang memberikan informasi bagus akan membedakan dengan perusahaan yang tidak memiliki berita bagus dengan menginformasikan pada pasar tentang keadaan mereka. Sinyal tentang bagusnya kinerja masa depan yang diberikan oleh perusahaan yang kinerja keuangan masa lalunya tidak bagus tidak akan dipercaya oleh pasar (Dwiyanti, 2010).

Manajer pada umumnya termotivasi untuk menyampaikan informasi yang baik mengenai perusahaannya ke publik secepat mungkin, misalnya melalui jumpa pers. Pihak diluar perusahaan tidak tahu kebenaran dari informasi yang disampaikan. Jika manajer dapat memberi sinyal yang meyakinkan maka publik akan terkesan dan hal ini akan terefleksi pada harga sekuritas. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi adalah karena terdapat informasi asimetri informasi antara perusahaan dengan pihak eksternal. Pihak eksternal kemudian menilai perusahaan sebagai fungsi dari mekanisme signaling yang berbeda. Kurangnya informasi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan, dan kemungkinan pihak lain eksternal yang tidak memiliki informasi akan berpresepsi sama tentang nilai semua perusahaan. Pandangan seperti akan merugikan perusahaan yang memiliki kondisi yang lebih baik karena pihak eksternal akan menilai perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya dan demikian juga sebaliknya.

Dengan demikian dapat disimpulkan karena adanya *asymetric information*, pemberian sinyal kepada investor atau publik melalui keputusan-keputusan manajemen menjadi sangat penting (Atmaja, 2008). *Asymetric information* adalah kondisi dimana suatu pihak memiliki informasi yang lebih banyak daripada pihak lain. Misalnya pihak manajemen perusahaan memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pihak investor dipasar modal.

2.2 Manajemen Laba

Menurut Nuryaman (2008) bahwa manajemen laba adalah suatu kondisi dimana manajemen melakukan intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat meratakan, menaikkan, dan menurunkan pelaporan laba. Manajemen laba terjadi ketika manajemen menggunakan keputusan tertentu dalam laporan keuangan dan transaksi untuk mengubah laporan keuangan sebagai dasar untuk mempengaruhi hasil kontraktual yang mengandalkan angka-angka akuntansi yang dilaporkan. Menurut Healy dan wahlen. (1999) Manajemen laba dapat terjadi karena manajer diberi keleluasaan untuk memilih metode akuntansi yang akan digunakan dalam mencatat dan mengungkapkan informasi keuangan privat yang dimiliki (Tarjo dan Sulistyowati, 2005).

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan perilaku *oportunistik* manajemen dengan cara memanipulasi proses pelaporan untuk mengejar tujuan pribadi sehingga dapat menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Manajemen laba merupakan salah satu faktor laporan keuangan yang dapat mempengaruhi kredibilitas dan menambah bias laporan keuangan, hal ini dapat merugikan pemakai laporan keuangan karena mereka mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa (Fathoni, 2013).

Berikut adalah rumus-rumus yang dipakai dalam manajemen laba :

1. *Akrual diskresioner (DA)* menggunakan model *jones* modifikasian (*Modified jones model*)

a.) Menghitung total akrual

$$TA_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

Keterangan:

TA_{it} = akrual total perusahaan I pada periode t

A_{it-1} = aset total perusahaan I periode t-1 (awal tahun)

b.) Menghitung akrual Non-Diskresioner (*Non-Discretionary Accrual*)

$$NDA_{it} = \alpha_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_{1i} \frac{(\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it})}{A_{it-1}} + \beta_{2i} \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) + \varepsilon_{1i}$$

Keterangan :

ΔREV_{it} = pendapatan perusahaan i periode t dikurangi pendapatan pada periode t-1

ΔREC_{it} = piutang perusahaan i periode t dikurangi piutang pada periode t-1

PPE_{it} = aset tetap berwujud kotor perusahaan i periode t

ε_{1i} = akrual diskresioner perusahaan I pada periode t

$\alpha, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ = parameter yang diperoleh dari persamaan regresi

c.) Menghitung *discretionary accrual (DA)*

pengukuran nilai akrual diskresioner (DA) diestimasi dengan selisih antara total akrual dengan nilai akrual non-diskresioner (NDA).

$$DA_{it} = \frac{TA_{it}}{A_{it-1}} - NDA_{it}$$

Keterangan :

DA_{it} = Akrual diskresioner perusahaan i pada periode t.

NDA_{it} = Akrual non-diskresioner perusahaan i pada periode t

TA_{it} = Akrual total perusahaan i pada periode t.

A_{it-1} = Aset total perusahaan i pada periode t-1 (awal tahun).

2. Menggunakan akrual modal kerja / penjualan (Utami, 2005) sebagai berikut:

Manajemen laba (ML) = akrual modal kerja (t) / penjualan (t)

Akrual modal kerja = $\Delta AL - \Delta HL - \Delta KAS$

Keterangan :

ΔAL = perubahan aktiva lancar pada periode t

ΔHL = perubahan hutang lancar pada periode t

ΔKAS = perubahan kas dan setara kas pada periode t

2.2.1 Motivasi Manajemen Laba

Menurut Scoot (1997), motivasi manajer perusahaan dalam melakukan manajemen laba adalah sebagai berikut:

1. Rencana bonus (*bonus schem*). Secara spesifik dalam perluasan hipotesis rencana bonus dinyatakan bahwa manajer-manajer perusahaan yang menggunakan rencana bonus akan memaksimalkan pendapatan masa kini atau tahun berjalan mereka. Manajer bekerja diperusahaan dengan rencana bonus akan berusaha mengatur laba yang dilaporkan agar dapat memaksimalkan bonus yang akan diterimanya.
2. Kontrak utang jangka panjang (*debt covenant*). Motivasi ini sejalan dengan hipotesis *debt covenant* dalam teori akuntansi positif, yaitu semakin dekat suatu perusahaan kepada pelanggaran perjanjian utang maka manajer akan cenderung memilih metode akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang keperiode berjalan untuk mengurangi kepentingan perusahaan mengalamipelanggaran kontrak.
3. Motivasi politik (*political motivation*). Perusahaan besar dan industri strategis cenderung menurunkan laba untuk mengurangi kinerja keuangannya yang menonjol, khususnya selama periode kemakmuran tinggi. Tindakan ini dilakukan untuk memperoleh kemudahan dan fasilitas dari pemerintah, misalnya subsidi.

4. Motivasi perpajakan (*taxation motivation*). Perpajakan merupakan salah satu alasan utama mengapa perusahaan mengurangi laba yang dilaporkan maka perusahaan dapat meminimalkan besar pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah.
5. Pergantian *chief executive officer* (CEO). CEO yang akan habis masa penugasannya atau pensiun akan melakukan strategi memaksimalkan laba untuk meningkatkan bonusnya, demikian pula dengan CEO yang kinerjanya kurang baik, ia akan cenderung memaksimalkan laba untuk mencegah atau membatalkan pemecatannya .
6. Penawaran saham perdana(*initial public offering*). Saat perusahaan *go public*, informasi keuangan yang ada dalam prospektus merupakan sumber informasi yang penting, informasi ini dapat dipakai sebagai sinyal kepada calon investor maka manajer berusaha menaikkan laba yang dilaporkan .

2.2.2 Pola-Pola Manajemen Laba

Scoot (2009) mengidentifikasi pola-pola manajemen laba terkait dengan *earning quality* yang pada umumnya dilakukan oleh perusahaan yakni:

1. *Taking a bath* terjadi umumnya pada saat terjadi masalah pada perusahaan termasuk saat penggantian *CEO* baru. Jika perusahaan harus melaporkan kerugian maka pihak manajemen akan memilih untuk melaporkan kerugian dalam jumlah yang besar dengan memindahkan biaya-biaya yang seharusnya baru terjadi pada periode mendatang keperiode sekarang. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan laba yang tinggi pada masa yang mendatang.
2. Maksimalisasi pendapatan, kebijakan maksimalisasi pendapatan dilakukan oleh perusahaan guna memaksimalkan laba agar mendapatkan jumlah bonus yang lebih besar. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari pemecatan akibat dari kinerja yang buruk karena perusahaan tidak mencapai target laba yang diinginkan.
3. Minimalisasi pendapatan, perusahaan yang menerapkan bentuk kebijakan minimalisasi pendapatan membenakan yang seharusnya terjadi dimasa

mendatang ke periode saat ini. Kebijakan ini dilakukan ketika saat perusahaan memperoleh keuntungan yang telampau tinggi dan perusahaan memilih kebijakan ini untuk menghindari perhatian politis seperti kewajiban perpajakan.

4. *Income smoothing* pada perusahaan merupakan bentuk kebijakan yang paling sering digunakan dan paling populer karena bentuk kebijakan ini yang paling menarik. Kebijakan *income smoothing* dilakukan untuk meningkatkan atau menurunkan jumlah laba dengan tujuan mengurangi fluktuasi laba yang terjadi.

2.2.3 Teknik Manajemen Laba

Manajemen laba dapat dilakukan dengan tiga tehnik menurut Azhari, (2015) yaitu :

1. Perubahan metode akuntansi manajemen mengubah metode akuntansi yang berbeda dengan metode sebelumnya sehingga dapat menaikkan atau menurunkan angka laba. Metode akuntansi memberikan peluang bagi manajemen untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda, misalnya:
 - Mengubah metode depresiasi aktiva tetap dari metode jumlah angka Tahun (*sum of the year digit*) ke metode depresiasi garis lurus (*straight line*)
 - Mengubah periode depresiasi
2. Memainkan kebijakan perkiraan akuntansi manajemen mempengaruhi laporan keuangan dengan cara memainkan kebijakan perkiraan akuntansi. Hal tersebut memberikan peluang bagi manajemen untuk melibatkan subjektivitas dalam menyusun estimasi, misalnya:
 - Kebijakan mengenai perkiraan jumlah piutang tidak tertagih
 - Kebijakan mengenai perkiraan biaya garansi
 - Kebijakan mengenai perkiraan terhadap proses pengadilan yang belum terputuskan.

3. Menggeser periode biaya atau pendapatan sering disebut manipulasi keputusan operasional, misalnya:
 - Mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai periode akuntansi berikutnya.
 - Mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya.
 - Kerjasama dengan vendor untuk mempercepat atau menunda pengiriman tagihan sampai periode akuntansi berikutnya.
 - Menjual investasi sekuritas untuk memanipulasi tingkat laba.
 - Mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak terpakai.

2.3 Theory Agency

Theory agency merupakan teori yang mendasari praktek bisnis perusahaan, dimana ketika pengelolaan perusahaan tidak lagi dilakukan oleh pemilik melainkan diserahkan kepada pihak lain, maka akan menimbulkan potensi konflik antara pemilik dengan pengelola yang sering disebut dengan *agency problem* Jensen dan Meckling, (1976). Terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan agen karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Eisenhardt (1989) menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia guna menjelaskan tentang teori agensi yaitu

1. manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*selfinterest*).
2. manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*boundedrationality*).
3. manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat manusia tersebut manajer sebagai manusia kemungkinan besar akan bertindak berdasarkan sifat (*opportunistic*) yaitu mengutamakan kepentingan pribadi.

Salah satu masalah yang akan timbul antara pemilik dan agen adalah terjadinya informasi asimetri (*asymmetry information*). Informasi asimetri ini adalah keadaan dimana agen lebih banyak memiliki informasi mengenai perusahaan

dan prospek masa depan perusahaan dibandingkan informasi yang dimiliki oleh pemilik dikarenakan agen adalah pihak pengelola perusahaan (Rachmawati, 2013).

Informasi yang lebih sedikit yang dimiliki oleh pemegang saham dapat memicu manajer menggunakan posisinya dalam perusahaan untuk mengelola laba yang dilaporkan, dimana laba yang dilaporkan ini dimaksudkan untuk memaksimalkan kesejahteraan sendiri yang berlawanan dengan kepentingan pemilik. Jika manajer memiliki paham yang sama dengan pihak pemegang saham maka masalah keagenan tidak akan timbul (Christiani dan Nurahanti, 2014). Oleh karena itu manajer mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik berupa laporan keuangan. Adanya ketidakseimbangan penguasaan informasi akan memicu munculnya kesempatan kepada manajer untuk melakukan praktik manajemen laba yang merugikan pemilik perusahaan. *Good corporate governance* adalah suatu konsep yang berdasarkan pada teori keagenan yang bertujuan untuk meminimalisasi konflik keagenan dan diharapkan dapat menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*) (Oktaviani, 2015)

2.4 Definsi *Good Corporate Governance*

Good corporate governance adalah konsep untuk peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau *monitoring* kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan (Nasution dan Setiawan (2007). *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) (2003) menjelaskan, sistem *corporate governance* memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditor sehingga mereka yakin akan memperoleh *return* atas investasinya dengan benar. *Good corporate governance* bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) sebagai bentuk pelaksanaan dalam mewujudkan kinerja perusahaan yang sehat. Menurut Surya dan Yusti (2008) *corporate governance*

merupakan suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai kesinambungan antara kekuatan dan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggung jawaban kepada *stakeholder*.

2.4.1. Mekanisme *Good Corporate Governance*

Mekanisme *good corporate governance* merupakan suatu hubungan antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan. Dalam penelitian ini untuk mengukur Mekanisme dalam *good corporate governance* antara lain:

1. Kepemilikan Manajerial

Jensen dan Meckling, (1976) menyatakan bahwa untuk meminimalkan konflik keagenan adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial didalam perusahaan. Sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer bertindak sekaligus sebagai seorang pemilik. Kepemilikan manajerial merupakan proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komiaris) jika kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh direksi semakin meningkat maka keputusan yang diambil oleh direksi akan lebih cenderung untuk menguntungkan dirinya dan secara keseluruhan akan merugikan perusahaan sehingga kemungkinan nilai perusahaan akan cenderung mengalami penurunan (Mutiya, 2012). Dalam penelitian ini kepemilikan manajerial diukur dengan menggunakan persentase jumlah manajemen dari seluruh modal saham yang beredar, yang mengacu pada jurnal (Sari dan Pratiwi, 2019) sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan manajerial} = \frac{\text{jumlah saham pihak manajerial}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

2. Dewan komisaris independen.

Komisaris independen merupakan suatu mekanisme yang bertugas untuk mengawasi dan memberi petunjuk kepada manajemen perusahaan. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006). Keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi integritas suatu laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Berdasarkan *The National Committee on Corporate Governance* menjelaskan fungsi dari dewan komisaris yakni untuk mengawasi direksi baik yang berhubungan dengan kebijakan dan pelaksanaan direksi dan berfungsi untuk memberikan saran kepada direksi. proporsi dewan komisaris dapat menjadi suatu mekanisme yang menentukan tindakan manajemen laba.

Kriteria komisaris independen menurut FCGI adalah sebagai berikut:

1. Komisaris independen bukan merupakan anggota manajemen.
 2. Komisaris independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas.
 3. Komisaris independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan
 4. Komisaris Independen harus bebas dari kepentingan dan urusan Bisnis apapun atau hubungan lainnya yang dapat, dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan.
- Rumus dewan komisaris independen yang mengacu pada jurnal (Abdillah *et al*, 2014) yaitu sebagai berikut :

DKI= Anggota dewan komisaris independen

Total dewan komisaris

3. Kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh pemilik institusional seperti perusahaan asuransi, *bank*, perusahaan investasi dan kepemilikan lainkecuali anak perusahaan dan institusi lain yang memiliki hubungan istimewa (perusahaan afiliasi dan perusahaan asosiasi) atas laporan yang dibuat menurut data di jakarta *stock exchange* serta kepemilikan saham oleh pihak *blockholders* yaitu saham yang dimiliki perseorangan diatas 5% selama tiga tahun berturut-turut tetapi tidak termasuk saham (Yendrawati, 2015). Tujuan adanya kepemilikan institusional yang dimiliki pihak luar perusahaan yang berbentuk institusi karena dianggap pihak yang independen. Sehingga diharapkan dapat mengurangi tindakan kecurangan yang dilakukan manajemen laba. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba manajer. Menurut Wahidawati, (2002) sesuai konsentarsi kepemilikan oleh investor yang berbentuk institusional dapat mengurangi biaya keagenan karena mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya tentang keberadaan dan kebijakan manajemen. Rumus kepemilikan institusional yang mengacu pada jurnal (Sari dan Pratiwi, 2019) adalah sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan institusional} = \frac{\text{jumlah saham institusi}}{\text{Total saham beredar}}$$

4. Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal dan mengamati sistem pengendalian internal. Komite audit memiliki peran dalam mengawasi pihak manajemen (*agent*) agar tidak melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri, sehingga komite audit harus mampu memastikan pelaporan keuangan yang lebih berkualitas bagi pemegang saham (Meiranto, 2013). Sesuai dengan keputusan ketua BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004, komite audit adalah komite yang

dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian.

Tugas komite audit antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

Rumus komite audit mengacu pada jurnal Abdillah *et al*, (2014) adalah sebagai berikut:

Komite audit = \sum anggota komite audit

2.4.2. Manfaat *Good Corporate Governance*

Manfaat dari penerapan *good corporate governance* menurut *forum for corporate governance* in Indonesia (FCGI 2001) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya.

4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder value* dan dividen.

2.4.3. Asas *Good Corporate Governance*

FCGI (2003) menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan semua jajaran perusahaan. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing asas GCG yang dikemukakan oleh *FCGI* (2003).

1. *Transparansi (Transparency)*. Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi relevan yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus berinisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting bagi pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan.
2. *Akuntabilitas (Accountability)*. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
3. *Responsibilitas (Responsibility)*. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
4. *Independensi (Independency)*. Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*). Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

2.5. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel	Metode	Proksi	Hasil
1.	Sari& putri (2014)	Pengaruh mekanisme <i>corporate governance</i> pada manajemen laba	X1= kepemilikan manajerial X2= kepemilikan institusional X3=dewan komisaris independen X4=ukuran dewan komisaris X5=komite audit Y= manajemen laba	Analisis regresi linear berganda digunakan sebagai teknik analisis.	Variabel GCG di proksikan oleh dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan komite audit. Manajemen laba diproksikan oleh akrual diskresioner	1.Variabel kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme GCG yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial mampu menurunkan tindakan manajemen laba. 2.Variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada manajemen laba.konsep dari porter mengungkapkan bahwa institusional adalah pemilik yang lebih memfokuskan pada <i>current earnings</i> . 3.Variabel proporsi dewan komisaris memiliki pengaruh

						<p>negatif terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen maka akan menurunkan tindakan manajemen laba.</p> <p>4. Variabel ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh pada manajemen laba. hal ini menyebutkan bahwa penentu dari efektivitas pengawasan terhadap manajemen perusahaan bukanlah besar kecilnya dewan komisaris, namun efektivitas, pengawasan tergantung bagaimana komunikasi, koordinasi, dan pembuatan keputusan.</p> <p>5. Variabel komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba dengan adanya komite audit di dalam perusahaan maka <i>discretionary accruals</i> (DA) semakin rendah.</p>
2.	Mahariana & Ramntha (2014)	Pengaruh kepemilikan manajerial	X1= kepemilikan manajerial	Hasil pengujian dengan	Mekanisme GCG diproksikan	1. kepemilikan manajerial berpengaruh negatif

		dan kepemilikan institusional terhadap manajemen laba	X2= kepemilikan institusional Y= manajemen laba	teknik analisis regresi linear berganda	oleh kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional Manajemen laba yang diukur menggunakan akrual diskresioner diestimasi dengan model <i>Jones</i>	terhadap manajemen laba, hasil ini membuktikan dengan adanya peningkatan kepemilikan saham oleh manajer dalam perusahaan akan mampu untuk menciptakan kinerja perusahaan secara optimal dan memotivasi manajer dalam bertindak agar lebih berhati-hati karena mereka ikut menanggung konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. 2 kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada manajemen laba. Hal tersebut mengindikasikan banyak atau sedikitnya hak suara yang dimiliki oleh institusi tidak dapat mempengaruhi tingkat besar kecilnya manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen.
3.	Asward dan lina (2015)	Pengaruh mekanisme <i>corporate</i>	X1= konsentarsi kepemilikan	Metode analisis dalam	Mekanisme gcg dalam penelitian ini	1. Konsentrasi kepemilikan memiliki arah negatif terhadap

		<p><i>governance</i> terhadap manajemen laba dengan pendekatan <i>conditional revenue model</i></p>	<p>X2= kepemilikan institusional X3= kepemilikan manajerial X4= komposisi dewan komisaris X5= ukuran komite audit Y= manajemen laba</p>	<p>penelitian ini yaitu <i>multiple regression analysis</i></p>	<p>diproksikan dengan konsentrasi kepemilikan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris, ukuran komite audit. Manajemen laba dalam penelitian ini di poksikan dengan <i>conditional revenue model</i></p>	<p>manajemen laba.hal ini berarti bahwa semakin tinggi konsentrasi kepemilikan pemegang saham dalam suatu perusahaan maka semakin rendah manajemen labadalam perusahaan. 2.kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba ini berarti bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin banyak kesempatan dan insentif untuk mengambil alih sumber daya perusahaan. 3.kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba,yang berarti bahwa semakin semakin tinggi tingkat kepemilikan saham oleh pihak manajemen,semakin tinggi pula kemungkinan praktik manajemen laba dalam perusahaan.</p>
--	--	---	---	---	---	---

						<p>4 komposisi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba yang berarti bahwa semakin banyak jumlah dewan komisaris independen dalam perusahaan maka semakin rendah praktik manajemen laba dalam perusahaan.</p> <p>5 ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Artinya bahwa komite audit dalam melakukan pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan belum berjalan efektif.</p>
4.	Sudjatna dan Muid (2015)	Pengaruh struktur kepemilikan, keaktifan komite audit, dan kualitas audit terhadap manajemen laba	X1=Struktur kepemilikan X2=Keaktifan komite audit X3=Kualitas audit Y=manajemen laba	Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda	GCG diprosikan oleh struktur kepemilikan, keaktifan komite audit, dan kualitas audit Manajemen laba diprosikan dengan	Hasil dari penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba perusahaan. Sedangkan kepemilikan manajerial, keaktifan komite audit, dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hal

						inimenunjukkan bahwa pemilik dengan jumlah saham yang besar dapat melakukan fungsi pengawasan dengan lebih maksimal.
5.	Octavia (2017)	Implikasi <i>corporate governance</i> dan ukuran perusahaan pada manajemen laba	X1= komisaris independen X2= kepemilikan institusional X3= kepemilikan manajerial X4= komite audit X5=ukuran perusahaan Y= manajemen laba. Variabel kontrol <i>leverage</i>	Metode yang digunakan dalam penelitian ini regresi berganda	GCG dalam penelitian ini diprosikan oleh komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit,	Variabel komisaris independen dan komite audit terdapat pengaruh negatif terhadap manajemen laba,kepemilikan manajerial,kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba, Variabel <i>Leverage</i> sebagai variabel kontrol,terdapat pengaruhPositif signifikan antaraleverage dan manajemen laba.Hasil penelitian menunjukkan bahwa besar kecilnya komposisi dewan komisaris tidak berdampak pada manajemen laba yangdilakukan oleh perusahaan. Institusi yang memiliki saham

						<p>cukup besar mempunyai kemampuan untuk melakukan intervensi terhadap perusahaan dan proses pelaporan keuangannya.</p> <p>Kepemilikan manajerial membuat tindakan manajerial selaras dengan pemegang saham sehingga dapat memperkecil perilaku oportunistik.</p> <p>Komite audit berfungsi secara optimal dalam melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan serta kinerja audit internal.</p>
--	--	--	--	--	--	---

2.6. Pengembangan Hipotesis

1. Kepemilikan Manajerial dan Manajemen Laba

Kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan. (Susiana dan Herawaty, 2005). Penelitian yang dilakukan Asward & Lina (2015) dan Octavia (2017) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba, semakin tinggi tingkat kepemilikan saham oleh pihak manajemen semakin tinggi pula kemungkinan praktek manajemen laba dalam perusahaan. Hal ini dikarenakan manajer mempunyai kepentingan pribadi yaitu adanya *return* yang diperoleh dari kepemilikan sahamnya pada perusahaan, dengan demikian manajer mempunyai kesempatan dalam melakukan manipulasi laba baik dalam bentuk

menaikkan laba maupun menurunkan laba. Selain itu dengan tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi dapat berdampak buruk terhadap perusahaan karena karena dapat menimbulkan masalah pertahanan yang berarti jika kepemilikan manajerial yang tinggi, para manajer memiliki posisi yang kuat untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan karena manajer memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan sehingga pihak pemegang saham eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan manajer. Dengan kata lain berdasarkan hasil penelitian ini kepemilikan manajerial belum dapat menjadi mekanisme *corporate governance* yang seharusnya dapat menekan tindakan manajemen laba.

H_1 : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba

2. Dewan komisaris independen terhadap manajemen laba

Penelitian yang dilakukan oleh Abdillah *et al*, (2014) dan Sari dan Putri, (2015) menyatakan bahwa Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen maka akan menurunkan tindakan manajemen laba, dengan adanya dewan komisaris independen akan memperkuat pengawasan seluruh aktivitas operasional perusahaan sehingga mekanisme dari *good corporate goverannace* dapat dijalankan dengan secara efektif didalam perusahaan. Alasan yang mendasari hasil penelitian ini adalah karena pihak independen tidak memiliki ikatan atau kepentingan terhadap pihak manajemen, sehingga bebas dari tekanan dan intervensi manajerial. Dengan semakin banyaknya pihak independen dalam komisaris maka proses pengawasan yang dilakukan akan semakin berkualitas seiring dengan banyaknya tuntutan pihak independen yang menginginkan adanya transparansi dalam pelaporan laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H_2 : Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

3. Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba

kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki institusi, pengaruh yang diberikan kepemilikan institusional sangat penting dalam menyeleraskan kepentingan manajemen serta pemegang saham. Penelitian yang dilakukan oleh Octavia (2017) dan Asward dan Lina (2015) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Semakin tinggi kepemilikan institusional atau yang disebut juga pemegang saham mayoritas maka semakin banyak pula kesempatan dan insentif untuk mengambil alih sumber daya perusahaan dengan mengorbankan pemegang saham minoritas. Dengan demikian hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₃:Kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba.

4. Komite audit terhadap manajemen laba

Komite audit adalah suatu komite yang dibentuk dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan perusahaan. Komite audit memiliki peranan penting dalam mengawasi berbagai aspek organisasi, oleh karena itu keberadaan komite audit telah diatur oleh pemerintah dengan mewajibkan perusahaan mempunyai komite audit. Tugas komite berhubungan dengan kualitas laporan keuangan, karena komite audit diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam pelaksanaan tugas yaitu mengawasi proses pelaporan keuangan oleh manajemen. Dengan adanya pengawasan dari komite audit maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan lebih informatif dan berkualitas. Penelitian yang dilakukan Sudjatna dan Muid (2015) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba, hal ini mengindikasikan fungsi komite audit dalam melakukan pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan belum berjalan dengan efektif dalam mengawasi kinerja manajer. Karena pengangkatan atau penambahan jumlah komite audit oleh perusahaan mungkin hanya dilakukan

untuk pemenuhan regulasi atau formalitas saja tapi tidak dimaksudkan untuk menegakkan GCG dalam perusahaan sehingga peran komite audit kurang efektif. Dengan demikian hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

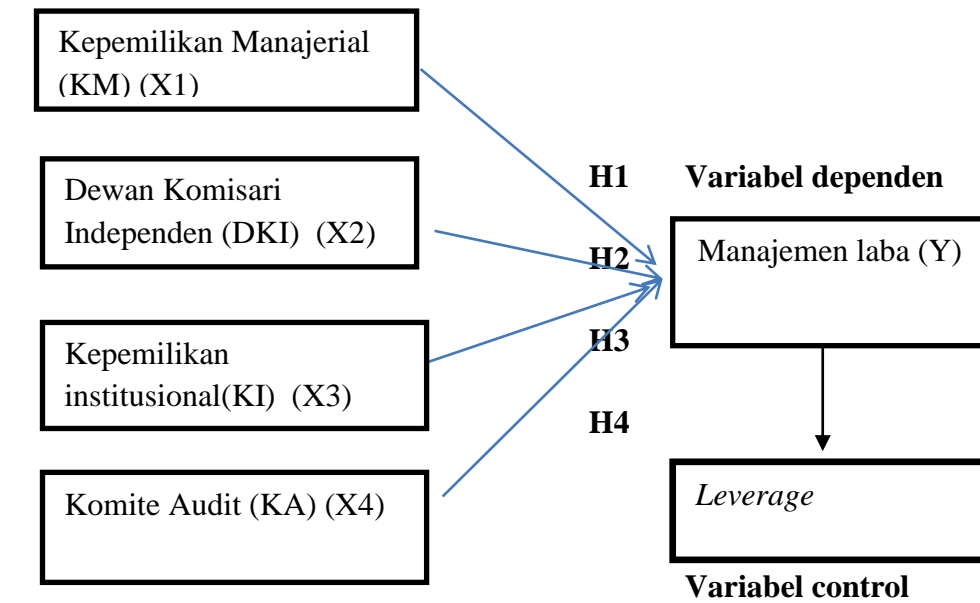
H_4 : Komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba

2.7. Kerangka Pikir

Kerangka pemikir dalam penelitian meliputi, *good corporate governance* dengan proksi kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit sebagai variabel independen sedangkan variabel dependen manajemen laba, dan untuk variabel *control* menggunakan *leverage*.

variabel independen

Good corporate governance (X)



Sumber : Dimodifikasi penulis (2020)

Gambar 2.1. Kerangka Pikir